

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP RISIKO
PERBANKAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program
Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Diponegoro

Disusun oleh:

ADHITYA RACHMADAN
NIM. C2C009018

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Adhitya Rachmadan
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009018
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP RISIKO PERBANKAN**
Dosen Pembimbing : Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D

Semarang, 20 Juni 2013

Dosen Pembimbing

(Puji Harto, S.E., M.SI., Akt., Ph.D.)

NIP. 197505272000121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Adhitya Rachmadan
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009018
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP RISIKO PERBANKAN**

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juni 2013

Tim Penguji

1. Puji Harto, S.E., M.SI., Akt., Ph.D. (.....)
2. Agung Juliarto, S.E., M.SI., Akt., Ph.D.(.....)
3. Dr. Darsono, SE., MBA., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Adhitya Rachmadan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RISIKO PERBANKAN** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan oranglain tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 20 Juni 2013

Yang membuat pernyataan,

Adhitya Rachmadan

NIM. C2C009918

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh peran mekanisme tata kelola perusahaan terhadap risiko perbankan. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, jumlah dewan direksi, kepemilikan institutional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing. Dalam penelitian ini risiko perbankan diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)* dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.

Perusahaan perbankan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2009-2011, sebanyak 29 bank. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institutional dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *CAR* dan kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *NPL* sedangkan kepemilikan asing berpengaruh terhadap *LDR*.

Kata Kunci: tata kelola perusahaan, risiko perbankan, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loan*, dan *Loan to Deposit Ratio*.

ABSTRACT

This study examined the influence of the corporate governance mechanism to the bank risk. Independent variables in this study are the proportion of independent directors, board size, institutional ownership. state-owned banks, and foreign-owned banks. Banking risk is comprise Capital Risk using Capital Adequacy Ratio (CAR), Credit Risk using Non Performing Loan (NPL) and Liquidity Risk Loan to Deposit Ratio (LDR).

Banking companies used in this research are all banking companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 2009-2011 consisting of 29 banks. so the total observation from the period is 83. The method of analysis used in this study was multiple regression.

The empirical results of this study show that instutional ownership and foreign ownership have a positive effect on CAR and government-ownership have a positive effect on NPL. meanwhile foreign ownership have a positive effect on LDR

Keywords: Corporate Governance, Risk Bank, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, And Loan To Deposit Ratio.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

**WE CAN'T CHOOSE WHERE WE COME FROM BUT WE CAN
CHOOSE WHERE WE GO FROM THERE.**

(Stephen Chobsky)

PERSEMBAHAN Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Kedua Orang tuaku tercinta
 - Adikku tersayang
- Keluarga, saudara dan sahabat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RISIKO PERBANKAN** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Universitas Diponegoro.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
2. Puji Harto, S.E., M.SI., Akt., Ph.D.Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan dan pengertian selama penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
3. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi
4. Ibu Rr. Sri Handayani, SE., M.Si., Akt dan Ibu Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dalam menjalani masa perkuliahan.

5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bapak Sugijanto Ilyas dan Ibu Rachmawati Rachman yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, kepercayaan, cinta, kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tak ternilai kepada penulis.
7. Adik tersayang, Kiki, yang selalu memberikan dukungan serta doa yang luar biasa.
8. Maria Graffeliesta Widya, Fauziah Nurul Fadhilah, Letsa Soraya, Mayco Defrio, Ema Diandra, Maretta Yohana, Sondra Rosalina, Serra Pungkas, Riris, Dian, dan Jihan Fahlevi atas segala masukan serta dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan, Alvin, Hazmi, Mahe, Arta, Ridho, Tia, Mita, Anggie, Randy, Doni, Rian, Ichsan, Tito, Silvy, Inna, Icha, Konny, Giska, Agni, Ayu, Arin, Revani, Pempi, Putu, Lovink, Domi, Fahry, Cemeng, Galus, Luanda, Geygy atas persahabatan dan motivasi yang telah diberikan selama ini
10. Seluruh teman-teman Akuntansi 2009 untuk persahabatan selama ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat digunakan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2013

Penulis,

Adhitya Rachmadan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	14
2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)	14
2.2. Pengertian dan Konsep Dasar <i>Corporate governance</i>	16
2.2.1. Pengertian <i>Corporate governance</i>	16
2.2.2. Mekanisme Penerapan <i>Corporate governance</i>	18
2.3. Pengertian Bank dan Risiko	

2.3.1.	Pengertian Bank.....	22
2.3.2.	Kegiatan Bank	22
2.3.3.	Risiko Bank	23
2.3.4.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	26
2.3.5.	<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	27
2.3.6.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	29
2.4.	Penelitian Terdahulu	30
2.4.1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	32
2.5.	Kerangka Pemikiran Teoritis	33
2.6.	Perumusan Hipotesis.....	34
2.6.1.	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap Risiko Bank	34
2.6.2.	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Risiko Bank	36
2.6.3.	Pengaruh Dewan Direksi terhadap Risiko Bank.....	39
2.6.4.	Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap Risiko Bank.....	41
2.6.5.	Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Risiko Bank.....	43
2.6.6.	Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Risiko Bank.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Definisi dan Operasional Variabel.....	48
3.1.1.	Variabel Dependen.....	48
3.1.2.	Variabel Independen	49
3.2.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	51
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	52
3.3.1.	Jenis Data	52
3.3.2.	Sumber Data.....	53
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	35
3.5.	Metode Analisis Data.....	53

4.3.2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap <i>CAR</i> , <i>NPL</i> , dan <i>LDR</i>	89
4.3.3. Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap <i>CAR</i> , <i>NPL</i> , dan <i>LDR</i>	90
4.3.4. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap <i>CAR</i> , <i>NPL</i> , dan <i>LDR</i>	91
4.3.5. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap <i>CAR</i> , <i>NPL</i> , dan <i>LDR</i>	92

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	93
5.2. Keterbatasan.....	95
5.3. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA	97
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian terdahulu	32
Tabel 3.1 Variabel Dummy Kepemilikan Bank	51
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	62
Tabel 4.2 Jumlah Sampel Penelitian63
Tabel 4.3 AnalisisDeskriptif	64
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian	66
Tabel 4.5 Uji Statistik Kolmogrov Smirnov Model 1	69
Tabel 4.6 Uji Statistik Kolmogrov Smirnov Model 2	71
Tabel 4.7 Uji Statistik Kolmogrov Smirnov Model 3.....	73
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas Model 1	74
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas Model 2	74
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas Model 3	75
Tabel 4.11 Hasil Uji Run Test Model 1	76
Tabel 4.12 Hasil Uji Run Test Model 2	76

Tabel 4.13 Hasil Uji Run Test Model 3	77
Tabel 4.14 Hasil Uji Glejser Model 1	78
Tabel 4.15 Hasil Uji Glejser Model 2	78
Tabel 4.16 Hasil Uji Glejser Model 3	79
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1	80
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2	81
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 3	81
Tabel 4.20 Model 1 Hasil Uji F	82
Tabel 4.21 Model 2 Hasil Uji F	82
Tabel 4.22 Model 3 Hasil Uji F	83
Tabel 4.23 Model 1 Hasil Uji T	84
Tabel 4.24 Model 2 Hasil Uji T	85
Tabel 4.25 Model 3 Hasil Uji T	86
Tabel 4.26 Tabel Ringkasan Hasil Uji Hopotesis Model 1	87
Tabel 4.27 Tabel Ringkasan Hasil Uji Hopotesis Model 2	87
Tabel 4.28 Tabel Ringkasan Hasil Uji Hopotesis Model 3	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar1.1 Komposisi Aset Lembaga Keuangan	1
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 Gambar Histogram Model 1.....	68
Gambar 4.2 Gambar Normal P-Plot Model 1	68
Gambar 4.3 Gambar Histogram Model 2.....	70
Gambar 4.4 Gambar Normal P-Plot Model 2	70
Gambar 4.5 Gambar Histogram Model 3.....	72
Gambar 4.6 Gambar Normal P-Plot Model 3	72

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Nama Perusahaan	102
Lampiran B Data Penelitian	103
Lampiran C Hasil Olah Data Statistik.....	109

BAB I

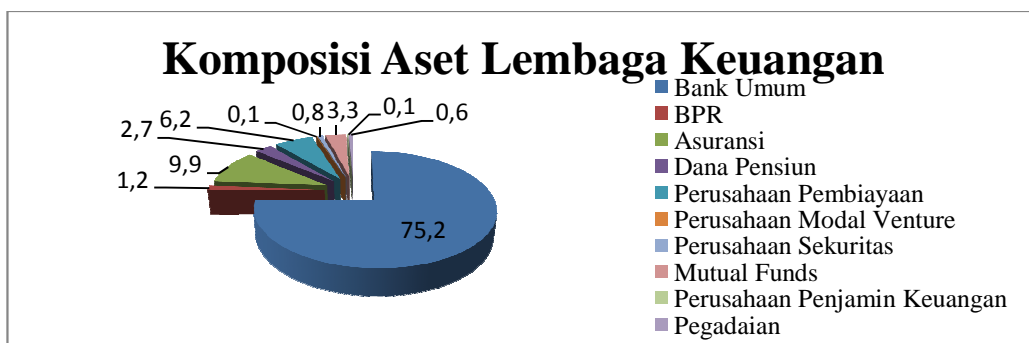
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam sistem keuangan negara untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Keberadaan bank sangat penting bagi perekonomian suatu negara untuk memperlancar lalu-lintas keuangan serta merupakan bagian dari sistem moneter yang memiliki kedudukan strategis dalam mobilitas pertumbuhan ekonomi suatu negara .

. Sektor keuangan di Indonesia masih didominasi oleh industri perbankan yang menunjukkan perkembangan yang cukup agresif. Nilai aset industri perbankan mencapai Rp.3.652,8 triliun pada akhir tahun 2011. Komposisi aset lembaga keuangan di Indonesia dapat di jelaskan pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Komposisi Aset Lembaga Keuangan



Sumber: Bank Indonesia dan Bappepam-LK, 2011

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa industri perbankan masih memegang peranan terbesar dalam sistem keuangan indonesia. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan dengan pangsa 2010 sebesar 79,5%, namun masih dominan dengan pangsa 75,2 %. Jumlah bank yang relatif sedikit namun dengan aset yang besar serta keterkaitannya dengan institusi keuangan lain seperti perusahaan pembiayaan harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi.

Kompleksitas usaha perbankan yang sangat tinggi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Pengertian Bank dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 31 salah satunya yaitu bank merupakan industri dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi kewajiban setiap saat ini, menjadi semakin penting artinya mengingat peranan bank sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Di samping faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan para pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan kepadanya serta keamanan atas uang atau asset lainnya yang dititipkan pada bank.

Kesehatan bank menurut Prasnuagraha (2007) diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan

mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana (Santoso & Triandaru, 2006). Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, yang dikenal dengan CAMELS.

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate governance* merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*.

Lemahnya penerapan *corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan maupun ambruknya korporasi di belahan dunia manapun. Seperti pada kasus PT Bank Century, Tbk sehingga bank diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 21 November 2008 untuk

dilakukan penanganan antara lain LPS melakukan Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan penggantian manajemen bank. Lalu kasus lainnya yang terjadi di Amerika yaitu kejatuhan Lehman Brother karena berinvestasi pada aset subprime mortgage akibat GCG tidak diterapkan secara konsisten (Daniri, 2009). Terjadinya berbagai kejadian tersebut banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan *corporate governance* menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan.

Dalam menanggapi kondisi tersebut, Bank Indonesia memberi perhatian lebih dalam tata kelola perbankan di Indonesia. Hal ini terlihat dari pembenahan fundamental dalam Perbankan Indonesia melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2004. Arsitektur Perbankan Indonesia atau API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Arsitektur Perbankan Indonesia memiliki 6 (enam) pilar salah satunya adalah menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi Internal perbankan nasional yang terletak pada pilar ke IV. Selain itu juga, pada tahun 2006 Bank Indonesia

mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan *corporate governance* pada Bank Umum yaitu PBI No 8/4/2006 yang kemudian direvisi menjadi PBI No 8/14/2006.

Penelitian *corporate governance* mulai dilakukan untuk memaparkan konsekuensi negatif dari sistem tata kelola (*governance system*), sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan implementasi *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan solusi yang ditawarkan oleh *agency theory* untuk membantu hubungan pemilik dan manajer, dan diharapkan dengan penerapannya dapat memberikan kepercayaan terhadap *agent* (manajemen) dalam mengelola kekayaan *principal* (investor), dan *principal* menjadi lebih yakin bahwa *agent* tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan *agent* dan mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Maka untuk mengatasi permasalahan *agency*, pihak perbankan melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola perusahaan. Untuk mencapai *good corporate governance* dibutuhkan suatu mekanisme cara kerja secara tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Walsd dan Seward (1990) berpendapat terdapat dua mekanisme untuk membantu perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham yaitu mekanisme pengendalian Internal dan mekanisme pengendalian eksternal. *Internal mechanism* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses Internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan *external mechanism* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar (Iskander & Chamlou, 2000) mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk mensejajarkan kepentingan antara manajer dengan para pemegang saham karena adanya kepentingan atau keinginan yang berbeda-beda (adanya konflik keagenan).

Penelitian sebelumnya banyak yang membahas pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja namun masih sedikit yang menghubungkan dengan risiko. Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap risiko perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Pathan(2009) menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan jumlah ukuran dewan direksi dan independensi komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap risiko. Penelitian yang dilakukan Faleye dan Krishnan (2010) menunjukkan bahwa jumlah ukuran independensi komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap risiko namun ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif. Sedangkan penelitian yang

dilakukan Tsorhe et al (2009) menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan index terhadap risiko perbankan yang diukur oleh *CAR*, *LDR*, *NPL* berpengaruh positif terhadap *CAR* dan *LDR* serta berpengaruh negatif terhadap *NPL*. Namun menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Beberapa perbedaan hasil yang terdapat dalam penelitian-penelitian tersebut di atas menunjukkan adanya *research gap*, sehingga perlu dilakukan kajian penelitian mengenai hubungan antara faktor-faktor tersebut di atas dengan risiko bank. Penelitian ini diperluas dengan menggunakan mekanisme *corporate governance* Internal dan eksternal yang akan dikaji terdiri dari komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi sebagai pengendali Internal dan kepemilikan institusional serta kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing sebagai pengendali eksternal dalam *corporate governance*.

Tujuan menambah variabel kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing berdasarkan penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Arun dan Turner (2003) menyatakan dalam hal bank pemerintah, pemerintah memiliki peran ganda sebagai regulator juga sebagai pemilik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. serta penelitian yang dilakukan oleh Berger et al (2000) dan Micco et al (2004) mengenai pengaruh keberadaan bank asing memberikan kesimpulan bahwa adanya peningkatan kepemilikan asing dikaitkan dengan risiko.

Penelitian ini menggunakan komponen diatas karena memiliki pengaruh langsung terhadap pelaksanaan *corporate governance* dimana kelima komponen tersebut memiliki tugas mengawasi dan mengontrol perusahaan secara langsung sehingga dapat meminimalisir *agency cost* yang mungkin akan terjadi akibat perbedaan kepentingan. Sedangkan untuk risiko diwakili oleh variabel *CAR* (mewakili kecukupan modal), *LDR* (mewakili risiko likuiditas), dan *NPL* (mewakili risiko kredit)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya kecukupan modal yang dimiliki bank. Semakin efisien modal bank yang digunakan untuk aktivitas operasional mengakibatkan bank mampu meningkatkan pemberian kredit sehingga akan mengurangi tingkat risiko bank.

Manajemen bank juga perlu untuk memperhatikan besarnya *Non Performing Loan (NPL)*. Hal tersebut mengingat bahwa kredit merupakan fokus, kegiatan utama perbankan dalam menjalankan fungsi Intermediasinya dan kredit merupakan sumber pendapatan keuntungan terbesar bagi bank. Namun demikian, yang perlu diwaspadai adalah kredit merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering kali justru menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah yang cukup serius.

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio keuangan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. Semakin rendah *LDR*, maka semakin tinggi tingkat likuiditas bank. Apabila tingkat likuiditas terlalu tinggi, dapat berpotensi merugikan bank

karena dana yang *idle* menjadi terlalu besar sehingga akan memperbesar cost of fund dan pada akhirnya akan meningkatkan risiko keuangan bank. Semakin tinggi *LDR*, maka semakin tinggi tingkat kredit diberikan. Semakin besar tingkat kredit yang diberikan, semakin meningkatkan potensi risiko kredit (gagal bayar) dan apabila *LDR* terlalu tinggi, bank justru dapat mengalami permasalahan berupa kesulitan likuiditas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diketahui bahwa perusahaan perbankan adalah jenis perusahaan yang mempunyai regulasi yang ketat bila dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya.

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis dan kualitas kinerja yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan para stakeholders lainnya agar perbankan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan efisien.

Penelitian mengenai mekanisme *corporate governance* terhadap risiko perbankan masih sangat jarang dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh pengungkapan mekanisme *corporate governance* terhadap risiko perbankan yang diukur oleh *CAR*, *LDR*, *NPL*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap permodalan yang diwakili oleh *CAR*, terhadap risiko likuiditas yang diwakili oleh *LDR* terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *NPL*?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap permodalan yang diwakili oleh *CAR*, terhadap risiko likuiditas yang diwakili oleh *LDR* terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *NPL*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap permodalan yang diwakili oleh *CAR*, terhadap risiko likuiditas yang diwakili oleh *LDR* terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *NPL*?
4. Apakah pengaruh kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap permodalan yang diwakili oleh *CAR*, terhadap risiko likuiditas yang diwakili oleh *LDR* terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *NPL*?
5. Apakah pengaruh kepemilikan asing berpengaruh terhadap permodalan yang diwakili oleh *CAR*, terhadap risiko likuiditas yang diwakili oleh *LDR* terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *NPL*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh langsung proporsi komisaris independen terhadap risiko perbankan yang diukur oleh *CAR*, *LDR*, dan *NPL*

2. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh langsung jumlah anggota dewan komisaris terhadap risiko perbankan yang diukur oleh *CAR*, *LDR*, dan *NPL*
3. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh langsung presentase kepemilikan institusional terhadap risiko perbankan yang diukur oleh *CAR*, *LDR*, dan *NPL*
4. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh langsung presentase kepemilikan pemerintah terhadap risiko perbankan yang diukur oleh *CAR*, *LDR*, dan *NPL*
5. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh langsung presentase kepemilikan asing terhadap risiko perbankan yang diukur oleh *CAR*, *LDR*, dan *NPL*

Manfaat dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoretis, yaitu:

1. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang terkait pengaruh mekanisme *Good corporate governance* terhadap *CAR*, *LDR* dan *NPL*

2. Bagi Regulator dan Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap risiko perbankan.
3. Bagi Perusahaan Perbankan sendiri selaku pelaku industri yang memiliki dampak bagaimana pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap risiko perbankan dapat sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian, penelitian – penelitian terdahulu, kerangka pemikiran untuk penelitian dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel–variabel penelitian (variabel independen dan variabel dependen) dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis data yang digunakan untuk penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis untuk penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis atau pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan dan saran-saran untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam mengkaitkan antara Mekanisme *corporate governance* terhadap *CAR*, *LDR*, dan *NPL*, tidak dapat dipisahkan dari manajemen dan pengurus bank. Pencapaian tujuan bank serta meminimalisir segala risiko yang ada di bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *corporate governance*. Teori agen dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999)

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal(s)*) melibatkan orang lain (*agent*). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak

dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan (agency theory), yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan keyakinan para investor bahwa *agent* (manajer) akan memberikan keuntungan bagi mereka, keyakinan bahwa *agent* (manajer) tidak akan mencuri, menggelapkan bahkan menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para *agent*(manajer). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

Industri perbankan adalah suatu industri yang sifat-sifatnya berbeda dengan industri lain seperti industri manufaktur, industri perdagangan, dan sebagainya. Perbedaan sifat-sifat yang terdapat dalam industri perbankan tersebut menyebabkan teori keagenan pada perusahaan perbankan mempunyai karakteristik sendiri. Perbankan adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, oleh sebab itu maka perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi. Risiko yang harus

dihadapi oleh industri perbankan sangat besar. Industri perbankan diharuskan untuk selalu menjaga kualitas pelayanannya kepada seluruh masyarakat agar likuiditas bank tetap terjaga. Dengan adanya regulasi yang terdapat di dalam industri perbankan tersebut, mengakibatkan hubungan keagenan yang terjadi di dalam industri perbankan berbeda dengan hubungan keagenan dalam industri lain yang tidak teregulasi ini terlihat adanya peraturan yang mengatur *good corporate governance* khusus untuk perbankan.

2.2 Pengertian dan Konsep Dasar *Corporate governance*

2.2.1 Pengertian *Corporate governance*

Corporate governance, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, merupakan solusi yang ditawarkan oleh *agency theory* untuk membantu hubungan pemilik dan manajer, dan meyakinkan *principal* bahwa *agent* tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan *agent*. Perhatian dunia terhadap *good corporate governance* (GCG) mulai meningkat tajam sejak negara-negara asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk Enron Corporation dan WorldCom di Amerika, HIH Insurance Company Ltd dan One-Tell Pty Ltd di Australia serta Parmalat di Itali pada awal tahun 2000 an. Hasil analisis yang dilakukan berbagai organisasi Internasional dan regulator pemerintah di banyak negara menemukan sebab utama

terjadinya tragedi ekonomi/bisnis yang ada karena lemahnya *corporate governance* di banyak perusahaan.

Corporate governance menurut *Forum Corporate governance Indonesia* (FCGI, 2001) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan Intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Forum Corporate governance Indonesia (FCGI, 2001) mengatakan bahwa dalam penerapan GCG, perusahaan akan mendapatkan empat manfaat yaitu (1) mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*, (2) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*, (3) mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

GCG mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*), dan diciptakan untuk dapat

melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG. Berdasarkan pertimbangan di atas dan tingginya tingkat kompleksitas serta risiko bisnis perbankan, Komite Nasional Kebijakan *Corporate governance* mengeluarkan Pedoman *Good corporate governance* Perbankan Indonesia (Indonesian Banking Sector Code) sebagai pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum GCG.

2.2.2 Mekanisme Penerapan *Corporate governance*

Walsd dan Seward (1990) menjelaskan bahwa pembagian mekanisme pengendali *corporate governance* menjadi 2, eksternal dan internal. Mekanisme eksternal dijelaskan melalui outsiders. Hal ini termasuk pemegang saham institusional, outside block holdings, dan kegiatan takeover. Mekanisme pengendalian eksternal tidak hanya pasar modal saja, tetapi juga perbankan sebagai penyuntik dana, masyarakat sebagai konsumen, supplier, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator, serta stakeholder lainnya. Mekanisme pengendalian Internal yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan tidak hanya dewan komisaris saja, tetapi ada juga komite-komite dibawahnya seperti dewan

direksi, sekretaris perusahaan, dan manajemen. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemegang saham Internal, anggota dari dewan komisaris dan karakteristiknya seperti ukuran dewan komisaris, jumlah dari dewan komisaris yang independen (dari luar perusahaan), komite remunerasi, pembiayaan utang.

Menurut Jensen (2001) tujuan utama dari sistem pengendalian Internal sebagai peringatan awal dalam mengembalikan organisasi sebelum mencapai tingkat kritis. Sistem *corporate governance* sangat kompleks dan terintegrasi sehingga diperlukan suatu mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol pada *corporate governance* dirancang untuk mengurangi ketidakefisienan kinerja manajemen perusahaan yang timbul karena moral hazard, kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Pada penelitian ini, indikator *corporate governance* yang digunakan adalah persentase jumlah anggota komisaris independen dan jumlah anggota dewan direksi sebagai mekanisme Internal, Persentase kepemilikan institusional, Kepemilikan Pemerintah, dan Kepemilikan Asing sebagai mekanisme eksternal.

1. Proporsi Komisaris Indenpenden

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan akan menjadi pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri. Dalam PBI

8/4/2006 menyatakan bahwa proporsi komisaris independen minimal 50% dari total anggota dewan komisaris perusahaan.

2. Jumlah Anggota Dewan Direksi

Dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian Internal bank, direksi mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian Intern; melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris; memelihara suatu struktur organisasi; memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung penerapan akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian Intern.

3. Persentase Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga, dapat mengurangi adanya manipulasi laba. Dengan begitu risiko yang ditimbulkan akan seminimal mungkin.

4. Kepemilikan Pemerintah

Dalam industri perbankan, pemilik merupakan subjek dari regulasi dan supervisi pemerintah. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berusaha membatasi Intervensi pemilik dalam pengelolaan bank karena adanya potensi manajemen untuk memaksimalkan kepentingan mereka yang menimbulkan potensi kerugian pihak lain. Disiplin manajer dalam mematuhi regulasi

tergantung pada karakter, kepentingan, dan kekuatan pemilik dalam mengendalikan manajemen bank (Sari, 2010)

5. Kepemilikan Asing

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Seperti diketahui, pihak asing merupakan pihak yang concern terhadap *corporate governance* dan terus melakukan pengembangan. Hal ini menjadikan perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Simerly & Li, 2001)

Isu kepemilikan Perusahaan lokal oleh perusahaan asing bukanlah hal yang baru lagi di dunia bisnis, begitu pula bank-bank lokal yang dibeli sahamnya oleh bank asing. Dalam *Business News* (25 Februari 2010), polemik ini dipicu oleh masuknya investor asing baik berwujud bank asing maupun lembaga investasi asing yang secara masif membeli saham-saham bank lokal yang dinilai berharga murah baik melalui pola pembelian di pasar modal maupun dengan menggunakan pola *strategic partner*.

Mekanisme pemantauan kepemilikan saham bank oleh pemegang saham asing (bank asing) melalui merger atau dengan cara pengendalian terhadap pengambilan keputusan melalui voting power dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mempekerjakan atau menunjuk seseorang untuk mewakilinya di dalam dewan komisaris untuk memastikan bahwa manajemen bekerja berdasarkan kepentingan para shareholders. (Siregar & Utama, 2005)

2.3 Pengertian Bank dan Risiko

2.3.1 Pengertian Bank

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.3.2 Kegiatan Bank

Dalam menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga Intermediasi, kegiatan bank sehari-hari juga tidak lepas dari kegiatan menerima uang dan mengeluarkan uang dalam bentuk kredit. Kegiatan perbankan yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI. Nomor 10 tahun 1998 terutama bank umum adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding)

- a) Simpanan tabungan (saving deposit)

- b) Simpanan giro (demand deposit)
- c) Simpanan deposito (time deposit)

2. Menyalurkan dana ke masyarakat

- a) Kredit investasi
- b) Kredit modal kerja
- c) Kredit perdagangan
- d) Kredit konsumtif
- e) Kredit produktif kerja

3. Memberikan jasa perbankan lainnya

- a) Kliring
- b) Pengiriman uang (transfer)
- c) Inkaso
- d) Letter of credit (L/C)
- e) Perdagangan surat berharga
- f) Perdagangan valuta asing
- g) Perbankan elektronik (ATM)

2.3.3 Risiko Bank

Bank Indonesia mendefinisikan risiko bank merupakan potensi terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank sehingga pihak BI pun

mengeluarkan kebijakan mengenai manajemen risiko untuk meminimalisirkan terjadinya risiko. Berdasarkan ketetapan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tahun 2003 tentang penerapan manajemen risiko bank umum, risiko-risiko yang dihadapi bank dan harus diwaspadai dan diantisipasi oleh bank dibedakan kedalam delapan jenis risiko, yaitu sebagai berikut :

1. Risiko kredit (*credit atau default risk*). Suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.
2. Risiko pasar (*market risk*). Risiko yang timbul akibat pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar, sehingga dari risiko ini akan menimbulkan risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko valuta asing.
3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*). Risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu.
4. Risiko operasional (*operating risk*). Risiko yang terjadi akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko hukum (*legal risk*). Risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketidadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak.
6. Risiko reputasi. Risiko yang diakibatkan adanya publikasi negatif yang reaktif dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko strategik. Risiko yang diakibatkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
8. Risiko kepatuhan. Risiko yang disebabkan ketidakpatuhan bank atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Ketentuan penerapan manajemen risiko untuk semua jenis risiko tidak semua berlaku bagi setiap bank. Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko tersebut. Sementara bagi bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko sekurang-kurangnya empat jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional (Siamat, 2005)

The Federal Reserve Board mengidentifikasi risiko menjadi enam jenis yaitu *credit risk*, *liquidity risk*, *market risk*, *operating risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*. *The Controller Of The Currency* (OCC) menggunakan sembilan risiko yaitu dengan

memasukan *divided into price risk, interest rate risk, dan foreign exchange risk*. (Koch dan MacDonald, 2006).

Menurut Shinkin Central Bank Annual Report (2008) dalam Deelchand & Padgett (2009) risiko dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu risiko yang harus dikontrol dan risiko yang harus diminimalkan. Jenis risiko yang harus dikontrol adalah risiko kredit, dan risiko likuiditas. Sementara itu, risiko operasional merupakan jenis risiko yang butuh diminimalkan. Untuk itu variabel risiko yang digunakan dalam penelitian ini adalah risiko yang berbasis manajemen keuangan bank. Maka data variabel kajian yang akan diambil adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* mewakili permodalan, *Non Performing Loan (NPL)* mewakili risiko kredit, *Loan to Deposit Ratio (LDR)* mewakili risiko likuiditas.

2.3.5 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam Mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian (Taswan, 2006). Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi oleh bank. Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas

yang dilakukannya. Berdasarkan kesepakatan Basel I, rasio permodalan minimum untuk industri perbankan diterapkan sebesar 8 %

Permodalan bank yang cukup atau banyak sangat penting karena modal bank dimaksudkan untuk memperlancar operasional sebuah bank (Siamat, 2005). Berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001, setiap bank wajib memenuhi kecukupan modal 8%. Tingkat kecukupan modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *CAR* memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko, yang dibiayai dari modal sendiri. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan (Warjiyo, 2004).

Dendawijaya (2005) mengungkapkan bahwa *CAR* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. *CAR* merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

2.3.5 *Non Performing Loan (NPL)*

Menurut peraturan bank Indonesia nomer 5 tahun 2003, risiko adalah potensi terjadinya peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena situasi

lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat peraturan Bank Indonesia tersebut, salah satu risiko usaha bank adalah risiko kredit, yang didefinisikan risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban. Menurut Susilo et al (1999) credit risk adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman terhadap masyarakat. Adanya berbagai sebab, membuat debitur mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman, pemabayaran bunga dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan.

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko kredit adalah *Non Performing Loan (NPL)*. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank (Almilia dan Herdiningtyas, 2005) *Non Performing Loan (NPL)* mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *Non Performing Loan (NPL)*, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Agar nilai bank terhadap rasio ini baik Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio *NPL* net dibawah 5%.

2.3.6 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu masalah yang kompleks dalam kegiatan operasional bank, hal tersebut dikarenakan dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban (Siamat, 2005).

Pada umumnya aktivitas suatu bank diarahkan pada usaha untuk meningkatkan pendapatan dengan meminimalkan risiko. Secara konvensional banyak bank mengutamakan aktivitas perkreditan sebagai sarana mencapai tujuan tersebut, namun ternyata banyak bank yang mengalami kepailitan. Aktivitas perkreditan dapat mendominasi penggunaan dana suatu bank karena perkreditan mempengaruhi aktivitas bank, penilaian atas tingkat kesehatan bank, tingkat kepercayaan nasabah serta tingkat pencapaian laba.

Menurut (Dendawijaya, 2005) *Loan to Deposit Ratio (LDR)* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan

dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari loan to deposit ratio suatu bank adalah sekitar 80%. Namun, batas toleransi berkisar antara 85% sampai 100% (Dendawijaya, 2005).

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan hubungan antara GCG terhadap risiko perbankan diantaranya penelitian mengenai kinerja bank pada beberapa negara di negara industri dan negara berkembang. Sampel pada penelitian ini adalah bank-bank dari 179 negara di seluruh dunia pada periode 1995-2002. Dari sampel tersebut ada 49.804 observasi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa bank milik pemerintah di negara berkembang memiliki biaya lebih tinggi jika dibandingkan bank asing.

(Hastuti, 2005) meneliti hubungan antara GCG dan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan

Lin dan Zhang (2006) meneliti mengenai hubungan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank di China. Sampel dari penelitian ini adalah 60 bank di China dengan periode data dari tahun 1997 sampai 2004. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kinerja bank dipengaruhi oleh perubahan

kepemilikan. Penelitian ini menggunakan variabel *NPL* untuk mengukur kualitas aset perbankan. Temuan dari penelitian ini adalah bank pemerintah di China mempunyai kualitas aset yang lebih rendah dibandingkan bank asing.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sujoko & Soebiantoro, 2007) secara parsial menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pathan (2009) menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan jumlah ukuran dewan komisaris dan independensi komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap risiko total risk (TR), idiosyncratic risk (IDIOR), and systematic risk (SYSR).

Sedangkan penelitian ini merujuk pada penelitian dilakukan Tsorhe et al (2009) menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* terhadap risiko perbankan yang diukur oleh *CAR*, *LDR*, *NPL* berpengaruh positif terhadap *CAR* dan *LDR* serta berpengaruh negatif terhadap *NPL*. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dengan menambahkan mekanisme kepatutan kepemilikan. Untuk memperluas lingkup mekanisme *good corporate governance* tidak hanya Internal namun juga eksternal.

No	Nama Peneliti	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Alejandro Micco Ugo Panizza (2004)	Bank Asing, dan Bank Pemerintah Growth Rate Loan	Regresi Berganda	bank milik pemerintah di negara berkembang memiliki biaya lebih tinggi jika dibandingkan bank asing.
2	Hastuti (2005)	GCG, Struktur kepemilikan, dan kinerja keuangan	Regresi berganda	Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan dengan kinerja Perusahaan.
3	Soejoko Dan Soebiantoro (2007)	Struktur Kepemilikan & Nilai Perusahaan (CAR)	Regresi Berganda	Variabel Kepemilikan Institusional Mempunyai Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> .
4	Pathan (2009)	Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, TR, IDIOR, SYSR	Regresi Berganda	Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif sedangkan proporsi komisaris independen positif terhadap risiko
5	Tsorhe et al (2009)	Board Index, CAR, NPL, dan LDR	Regresi Berganda	mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap risiko perbankan yang diukur oleh CAR, LDR, NPL berpengaruh positif terhadap CAR dan LDR serta berpengaruh negatif terhadap NPL. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

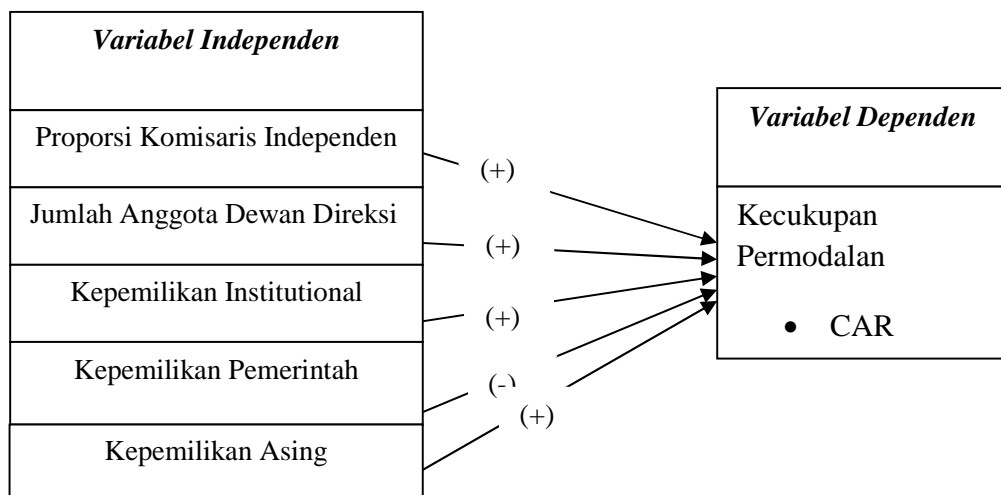
2.5 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Mekanisme Good *Corporate governance* dan Risiko Perbankan

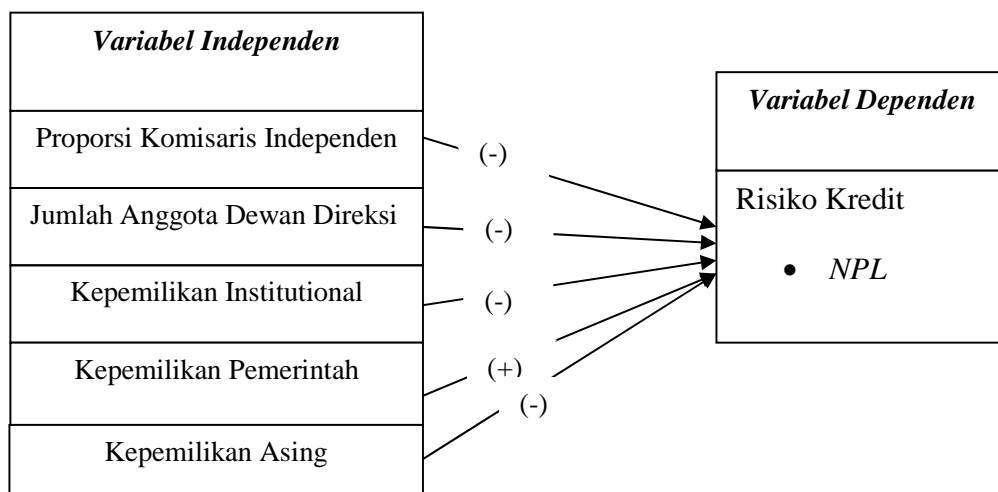
Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Teoritis

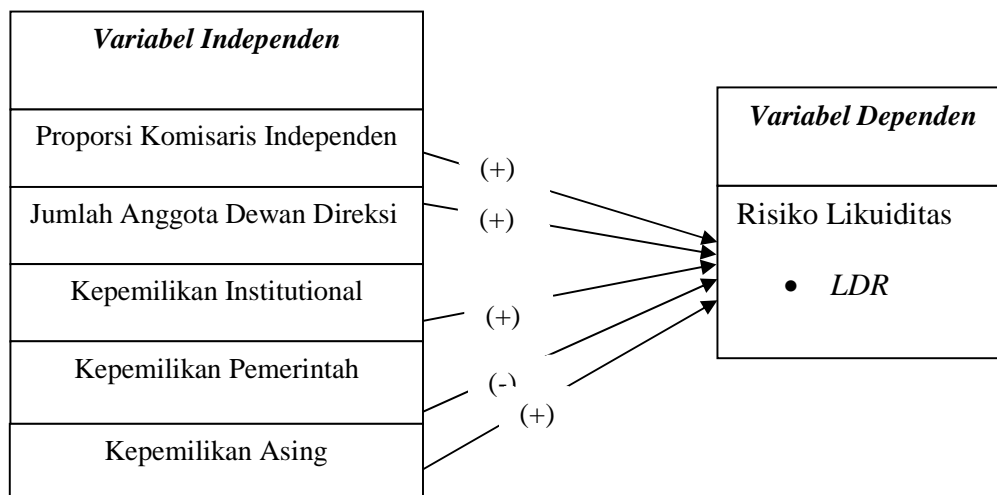
Model 1 : Pengaruh Mekanisme Good *Corporate Governance* Terhadap Permodalan yang diukur oleh *CAR*



Model 2 : Pengaruh Mekanisme Good *Corporate governance* terhadap Risiko Kredit yang diukur oleh *NPL*



Model 3 : Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap risiko likuiditas yang diwakili oleh *LDR*



2.6 Perumusan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh *Mekanisme Corporate governance* Terhadap Risiko Perbankan

Teori Keagenan dapat digunakan untuk menjawab mekanisme *good corporate governance* terhadap Risiko Perbankan. Bank sebagaimana lembaga keuangan atau perusahaan umum lainnya dalam menjalankan kegiatan selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menyebabkan kerugian terhadap bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Eksekutif dalam manajemen bank serta seluruh pihak terkait, secara khusus harus mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha bank, serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko tersebut muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat.

Pemahaman umum mengenai masing-masing kategori risiko adalah penting sehingga para manager, pelaksana (*risk taker*), dan bagian pengawasan dapat berdiskusi tentang masalah-masalah umum yang secara alami terjadi dari berbagai eksposur risiko. Risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam rangka menghasilkan laba yang tinggi. Agar manfaat tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan harus mengerti tentang risiko dan pengelolaannya.

Mekanisme *corporate governance* dipengaruhi oleh serangkaian hubungan antara pihak Internal maupun eksternal. Pihak yang berkepentingan dalam perusahaan mengambil langkah-langkah di bidang risiko manajemen untuk memastikan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan bisnis dan kelangsungan bisnis, kegagalan mereka dalam mengendalikan risiko dari tata kelola *corporate governance*. Pencapaian tujuan bank dalam meminimalisir segala risiko yang ada di bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan

penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999).

2.6.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Risiko Perbankan

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. FCGI (2003) menyatakan bahwa “Komisaris Independen memiliki peranan penting dalam memonitor perusahaan.” Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Menurut FCGI (2003) Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat direksi dapat memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut), memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang profesional, memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik, memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam

menjalankan operasinya, memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik serta memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Keberadaan komisaris independen atau anggota komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi dengan lebih luas kepada investor (Eng et. al, 2003). Komisaris independen lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Penelitian mengenai dampak dari proporsi dewan komisaris independen terhadap risiko perbankan masih beragam. Erkens, Hung, and Matos (2009) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap risiko perbankan yang diukur dengan writedowns. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

Capital Adequacy *adequacy* Ratio (*CAR*) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya kecukupan modal yang dimiliki bank. Semakin efisien modal bank yang digunakan untuk aktivitas operasional mengakibatkan bank mampu meningkatkan pemberian kredit sehingga akan mengurangi tingkat risiko bank.

H1a : Proporsi *komisaris independen* berpengaruh positif terhadap kecukupan modal yang diwakili oleh *CAR*

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko kredit adalah *Non Performing Loan (NPL)*. *Non Performing Loan (NPL)*

mencerminkan risiko kredit. Semakin kecil *Non Performing Loan (NPL)*, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank.

H1b : Proporsi *komisaris independen* berpengaruh negatif terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *NPL*

Rasio keuangan yang berhubungan dengan aspek likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Semakin rendah *LDR*, maka semakin tinggi tingkat likuiditas bank. Apabila tingkat likuiditas terlalu tinggi, dapat berpotensi merugikan bank karena dana yang *idle* menjadi terlalu besar sehingga akan memperbesar *cost of fund* dan pada akhirnya akan meningkatkan risiko keuangan bank.

H1c : Proporsi *komisaris independen* berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas yang diwakili oleh *LDR*

2.6.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Risiko Perbankan

Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya, maka manajer pada akhirnya akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal bagaimana mereka mengalokasikan danainvestor (Jensen & Meckling, 1976). Selain itu (Mizruchi, 1983) juga menjelaskan bahwa dewan merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan baru, berapa banyak dewan yang dibutuhkan perusahaan dan dengan semakin banyak dewan berarti perusahaan dapat meminimiliasi permasalahan agensi antara pemegang saham dengan direksi atau tidak. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang resources dependence (Alexander, Fernell, Halporn, 1993; Goodstein, Gautarn, Boeker, 1994; Mintzberg, 1983) dalam (Wardhani, 2006) Maksud dari pandangan resources dependence adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Pfeffer & Salancik (1978) dalam (Wardhani, 2006) juga menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi.

Dengan di terapkannya *corporate governance* (tata kelola perusahaan) sebagai *system* yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola kekayaan pemegang saham (pemilik). Hal ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pailit dan meminumkan risiko. Berdasarkan urain tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya kecukupan modal yang dimiliki bank. Semakin efisien modal bank yang digunakan untuk aktivitas operasional mengakibatkan bank mampu meningkatkan pemberian kredit sehingga akan mengurangi tingkat risiko bank.

H2a : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kecukupan modal yang diwakili oleh *CAR*

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko kredit adalah *Non Performing Loan (NPL)*. *Non Performing Loan (NPL)* mencerminkan risiko kredit. Semakin kecil *Non Performing Loan (NPL)*, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank.

H2b : Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *NPL*

Rasio keuangan yang berhubungan dengan aspek likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Semakin rendah *LDR*, maka semakin tinggi tingkat likuiditas bank. Apabila tingkat likuiditas terlalu tinggi, dapat berpotensi merugikan bank karena dana yang *idle* menjadi terlalu besar sehingga akan memperbesar *cost of fund* dan pada akhirnya akan meningkatkan risiko keuangan bank.

H2c : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas yang diwakili oleh *LDR*

2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Institutional Terhadap Risiko Perbankan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan institusional adalah salah satu mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*).

Menurut (Faizal, 2004) peningkatan kepemilikan institusional (lebih dari 5%) akan menyebabkan usaha pengawasan yang lebih besar sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik dari manajer sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Investor institusional akan lebih memilih dan mendukung kebijakan yang dapat meningkatkan insentif jangka panjang bagi perusahaan.. Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dalam meminimalkan risiko yang ada.

Penelitian Sujoko dan Soebiyantoro (2007) secara parsial menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Semakin meningkat kepemilikan institusional diharapkan semakin kuat kontrol terhadap manajemen. Dengan demikian kepemilikan institusional diprediksikan berpengaruh positif terhadap *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

H3a : Kepemilikan Institutional berpengaruh positif terhadap kecukupan modal yang diwakili oleh *CAR*

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko kredit adalah *Non Performing Loan (NPL)*. *Non Performing Loan (NPL)* mencerminkan risiko kredit. Semakin kecil *Non Performing Loan (NPL)*, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank.

H3b : Kepemilikan Institutional berpengaruh negatif terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *NPL*

Rasio keuangan *LDR* merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang disalurkan bank berupa kredit. Dana yang dikumpulkan merupakan dana yang diperoleh dari pihak ketiga, seperti investor dana masyarakat. Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio (LDR)* maka semakin rendah likuiditas bank.

H3c : Kepemilikan Institutional berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas yang diwakili oleh *LDR*

2.6.4 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Risiko Perbankan

Hasil penelitian Lin dan Zhang (2006) yang menunjukkan bahwa bank-bank komersial milik negara kurang efisien dibandingkan dengan bank lain serta mengindikasikan bahwa bank umum milik pemerintah lebih rendah profitabilitasnya dibandingkan bank-bank lain dan kurang efisien. Kecenderungan yang terjadi jika

fokus pengendalian pada pemerintah ialah mereka menggunakan kekayaan perusahaan untuk tujuan politik selain itu penelitian mengenai peran kepemilikan pemerintah dalam kinerja bank juga dilakukan oleh Micco et al (2004) melakukan penelitian mengenai kinerja bank pada beberapa negara industri dan berkembang menunjukkan bahwa kinerja bank pemerintah memiliki profitabilitas yang rendah dan biaya yang tinggi. Karena ada kewajiban bank pemerintah dalam pembangunan negara dan juga adanya Intervensi pemerintah. Hasil studi mereka memperlihatkan bahwa kepemilikan pemerintah memperlambat perkembangan yang terjadi di sektor keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah cenderung kurang efisien dalam mengelola perusahaan termasuk dalam pengendalian risikonya. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya kecukupan modal yang dimiliki bank. Semakin efisien modal bank yang digunakan untuk aktivitas operasional mengakibatkan bank mampu meningkatkan pemberian kredit sehingga akan mengurangi tingkat risiko bank.

H4a : Kepemilikan Pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecukupan modal yang diwakili oleh *CAR*

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko kredit adalah *Non Performing Loan (NPL)*. *Non Performing Loan (NPL)*

mencerminkan risiko kredit. Semakin kecil *Non Performing Loan (NPL)*, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank.

H4b :Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *NPL*

Dengan adanya kepemilikan pemerintah. Pemerintah dapat membatasi intervensi pemilik dalam pengelolaan bank melalui regulasi karena adanya potensi manajemen untuk memaksimalkan kepentingan mereka yang dapat mempengaruhi rasio keuangan yang berhubungan dengan aspek likuiditas yaitu *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Semakin rendah *LDR*, maka semakin tinggi tingkat likuiditas bank. Apabila tingkat likuiditas terlalu tinggi, dapat berpotensi merugikan bank karena dana yang *idle* menjadi terlalu besar sehingga akan memperbesar *cost of fund* dan pada akhirnya akan meningkatkan risiko keuangan bank.

H4c :Kepemilikan Pemerintah berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas yang diwakili oleh *LDR*

2.6.5 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Risiko Perbankan

Kepemilikan asing dapat dilihat sebagai salah satu mekanisme yang melengkapistruktur pemerintahan saat ini untuk mengawasi manajemen dari aktivitas maximaxing. Sehingga, investor asing akan lebih memilih mendukung kebijakan

untuk meminimalkan risiko yang ada di perbankan sehingga mencapai tujuan perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Micco et al(2004) melakukan penelitian mengenai kinerja bank pada beberapa negara industri dan berkembang menunjukkan bahwa bank asing tingkat profitabilitasnya lebih tinggi dan biayanya lebih rendah dibandingkan bank pemerintah. Hasil penelitian Berger et al (2000) meneliti efisiensi bank-bank di Perancis, Jerman, Spanyol, dan Amerika Serikat pada periode 1990an. Menjelaskan bahwa bank asing memiliki keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing mereka dibandingkan bank domestik. Bank Asing dapat menghasilkan keuntungan lebih baik karena umumnya mereka memiliki manajemen risiko yang lebih baik (Havrylchuk, 2006) Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya kecukupan modal yang dimiliki bank. Semakin efisien modal bank yang digunakan untuk aktivitas operasional mengakibatkan bank mampu meningkatkan pemberian kredit sehingga akan mengurangi tingkat risiko bank.

H5a : Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap kecukupan modal yang diwakili oleh *CAR*

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko kredit adalah *Non Performing Loan (NPL)*. *Non Performing Loan (NPL)*

mencerminkan risiko kredit. Semakin kecil *Non Performing Loan (NPL)*, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank.

H5b : Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *NPL*

Rasio keuangan yang berhubungan dengan aspek likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Semakin rendah *LDR*, maka semakin tinggi tingkat likuiditas bank. Apabila tingkat likuiditas terlalu tinggi, dapat berpotensi merugikan bank karena dana yang *idle* menjadi terlalu besar sehingga akan memperbesar *cost of fund* dan pada akhirnya akan meningkatkan risiko keuangan bank.

H5c : Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas yang diwakili oleh *LDR*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel risiko perbankan yang berbasis manajemen keuangan (risiko keuangan perbankan) yang diwakili oleh rasio-rasio keuangan: *Capital Adequacy Ratio (CAR)* mewakili permodalan, *Non Performing Loan (NPL)* mewakili risiko kredit, *Loan to Deposit Ratio (LDR)* mewakili risiko likuiditas

2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi proporsi komisaris independen dan jumlah anggota dewan direksi sebagai mekanisme Internal, serta persentase kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing sebagai mekanisme pemantauan kepemilikan.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

3.1.2.1 Variabel Dependen

- 1 *Capital Adequacy Ratio (CAR)* rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Rasio ini memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank (Dendawijaya, 2005). Sesuai dengan SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, *CAR* dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{MODAL}}{\text{AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO}} \times 100\%$$

- 2 *Non Performing Loan (NPL)* merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank (Siamat, 2005).

$$NPL = \frac{\text{Aktiva produktif bermasalah}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100\%$$

- 3 *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap volume dana yang diterima atau dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito, dan kewajiban jangka pendek lainnya) (Taswan, 2006). Sesuai dengan SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004,

LDR dirumuskan sebagai berikut: Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank). Dana Pihak Ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar Bank).

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{(\text{Penghimpunan Dana} + \text{Modal Inti})} \times 100\%$$

3.1.2.2 Variabel Independen

1. Proporsi Komisaris Independen

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) 2006 menyatakan bahwa Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Proporsi Komisaris Independen diukur berdasarkan persentase (%) antara jumlah anggota Komisaris Independen dibandingkan dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris.

2. Jumlah Anggota Dewan Direksi

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2008, tentang Pelaksanaan *Good corporate governance* Bagi Bank Umum, Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan. Jumlah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

3. Persentase Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (badan). Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk memonitor manajemen.

Skala yang digunakan untuk kepemilikan institusional adalah rasio. Variabel ini diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki oleh institusi yang tercantum di dalam annual report. Maka persentase kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan institusional yang ada dalam perusahaan. Berikut ini adalah rumusnya:

$$\text{Kepemilikan Institutional} = \frac{\text{Jumlah lembar saham kepemilikan institutional}}{\text{Total Jumlah saham yang beredar}}$$

4. Kepemilikan Pemerintah

Variabel kepemilikan pemerintah merupakan variabel dummy, jika perusahaan terdapat kepemilikan pemerintah sebesar 50% atau lebih maka dinyatakan dengan variabel dummy yaitu 1 dan jika sebaliknya yaitu 0

5. Kepemilikan Asing

Merupakan porsi outstanding share yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing (foreign investors) terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar. Variabel kepemilikan asing merupakan variabel dummy, jika perusahaan terdapat kepemilikan asing sebesar 50% atau lebih maka

dinyatakan dengan variabel dummy yaitu 1 dan jika sebaliknya yaitu 0. Batasan kepemilikan saham 50% merujuk dari Micco et al (2004)

Jika sampel bank tidak terdefinisi dalam klasifikasi tersebut maka bank tersebut didefinisikan sebagai bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang dimiliki oleh entitas domestik dan 50% sahamnya tidak dimiliki oleh pihak asing maupun pemerintah. Variabel *dummy* untuk bank swasta nasional secara otomatis akan terbentuk sebagai akibat pendefinisian bank pemerintah dan asing diatas seperti tertera ada tabel 3.1

Tabel 3.1. Variabel *Dummy* Kepemilikan Saham Bank

Tipe Bank	<i>Government</i>	<i>Foreign</i>
Bank Pemerintah	1	0
Bank Asing	0	1
Bank Swasta Nasional	0	0

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 – 2011 sebanyak 87

perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dimana pengambilan perusahaan sampel dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang sudah go public atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 sampai dengan 2011 berturut-turut.
2. Data laporan keuangan perusahaan perbankan tersedia berturut-turut untuk tahun pelaporan 2009 sampai dengan 2011.
3. Bank mempublikasikan laporan tahunan (annual report) untuk periode 31 Desember 2009-2011 di dalam website Bursa Efek Indonesia.
4. Data diungkapkan secara lengkap, baik data mengenai *corporate governance* perusahaan maupun data yang diperlukan untuk menghitung risiko perusahaan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa time series untuk seluruh variabel penelitian yaitu dewan direksi, , proporsi komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, Kepemilikan Pemerintah, dan Kepemilikan Asing, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Data sekunder merupakan data penelitian

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dandicatat oleh pihak lain), umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan tahunan perusahaan perbankan (annual report) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2011 yang dapat dilihat dari situs resminya yaitu <http://www.idx.co.id> website Bank Indonesia serta Indonesian Capital Market Directory (ICMD) periode 2009-2011.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter. Metode dokumenter dapat dilakukan dengan Cara mempelajari dokumen serta catatan-catatan yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan Cara melakukan studi pustaka dari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan *corporate governance* serta kinerja keuangan pada perusahaan, khususnya perusahaan perbankan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang berisi tentang data-data annual report yang mencakup data *corporate governance*. Data-data mengenai *corporate governance* antara lain berisi tentang ukuran dewan direksi,

proporsi komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, Kepemilikan Pemerintah, dan Kepemilikan Asing untuk periode 2009-2011..

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2009).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda, harus dilakukan uji klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) pada model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Selain itu juga dapat diketahui melalui nilai tolerance dan lawannya serta

melalui variance inflation factor (VIF) yang dihasilkan oleh variabel- variabel independen (Ghozali, 2009)

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model ini adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R² sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi antar variabel independen jika terdapat korelasi antar variabel independen yang cukup tinggi ($> 0,9$) hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- c. Dilihat dari nilai VIF dan Tolerance. Nilai cut off Tolerance $< 0,10$ dan VIF $>$ (berarti terdapat multikolonieritas)

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan $t-1$ (sebelumnya). Jika ya, maka terdapat masalah autokorelasi yang muncul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Gejala ini menimbulkan konsekuensi yaitu Interval keyakinan menjadi lebih lebar serta varians dan kesalahan standar akan ditafsir terlalu rendah. Data yang baik adalah terbebas dari autokorelasi (acak atau random). Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi

adalah uji Durbin-Watson dan Runs test. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu Cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara variabel dependen (terikat) dengan residualnya. Apabila grafik yang ditunjukkan dengan titik-titik tersebut membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu heteroskedastisitas juga dapat diketahui melalui uji Park maupun Uji Glejser (Glejser Test), yaitu dengan melakukan analisis regresi variabel independen terhadap nilai absolute residual (Gozali,2005). Dalam uji Glejser yaitu jika tingkat signifikansi diatas 5 persen atau jika $t \text{ hitung} > t \text{ table}$, maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Namun bila tingkat signifikansi dibawah 5 persen atau $t \text{ hitung} < t \text{ table}$, maka ada gejala heterokedastisitas

4. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian mengenai kenormalan distribusi data. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau

residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak adalah dengan analisis grafik histogram serta uji statistik non-parametrik yaitu One Sample Kolmogorov Smirnov Test (1-Sample K-S). Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Sedangkan Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Menurut (Ghozali, 2009) jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

3.5.3 Analisis Regresi

Analisis regresi berganda selain bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen (Ghozali, 2009) Penelitian ini menggunakan 3 model statistik, karena terdapat 3 variabel dependen. Model statistik yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Model Pertama

$$CAR = \alpha + \beta_1 IND + \beta_2 BRDSZ + \beta_3 INT + \beta_4 GOV + \beta_5 FOR + \varepsilon$$

2. Model Kedua

$$NPL = \alpha + \beta_1 IND + \beta_2 BRDSZ + \beta_3 INT + \beta_4 GOV + \beta_5 FOR + \varepsilon$$

3. Model Ketiga

$$LDR = \alpha + \beta_1 IND + \beta_2 BRDSZ + \beta_3 INT + \beta_4 GOV + \beta_5 FOR + \varepsilon$$

Keterangan :

CAR = Capital Adequacy Ratio

NPL = Non Performing Loan

LDR = Loan to Deposit Ratio

BRDSZ = Board of Direction Size

IND = Percentage of Independent Commissioner in bank

INT = Institutional Ownership

GOV = Government Ownership

FOR = Foreign Ownership

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji F (Uji Simultan)

Menurut (Ghozali, 2009) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alfa level 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel independentersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan keempat variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji T (Uji Parsial)

Menurut (Ghozali, 2009) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alfa level $0,05(\alpha=5\%)$. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketepatan garis regresi berganda mencocokkan data yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara nol dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka dapat diartikan bahwa variabel independen sama sekali tidak dapat mencocokkan variasi data variabel independen. Jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen semakin mendekati tingkat ketepatan mencocokkan variabel dependen. Dengan kata lain kesalahan pengganggu dalam model ini diusahakan minimum sehingga R^2 mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.

Namun R^2 memiliki kelemahan mendasar dalam penggunaannya yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.